



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 11A Tahun 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009

WALKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2009 yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 31 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 33 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP-3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Kepala Bapeda adalah kepala Bapeda Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA-APBD adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan penyusunan RKA SKPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menetapkan hal yang berkenaan dengan RKPD yang meliputi :
 - a. Isu Strategis;
 - b. Prioritas Pembangunan;
 - c. Rencana Kerja; dan
 - d. Kerangka Anggaran.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2009.
- (3) Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
FUNGSI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 3

RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2009 dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD;
- b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Tasikmalaya Tahun 2009.

Pasal 4

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan, Kepala SKPD melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan.
- b. Kepala SKPD menghimpun dan menganalisis serta mengevaluasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
- c. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 September 2008
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 september 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR .197A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka yang meliputi jangka panjang untuk jangka waktu 20 tahun, jangka menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana jangka pendek yang bersifat tahunan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam kerangka pembangunan daerah, RKPD merupakan hal yang sangat penting, karena akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana.

RKPD Kota Tasikmalaya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya. Selain itu sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat, perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan tahunan nasional dan Provinsi. Dalam konteks ini penyusunan RKPD harus mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat 2009.

RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2009 adalah dokumen perencanaan daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 yang memuat Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Kerangka Anggaran yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBN baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2009 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-SKPD) dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan APBD tahun 2009. Dengan mempertimbangkan kepada kemampuan anggaran yang ada, hal tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2009 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan-perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009;
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
25. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ tanggal 12 Januari 2007, Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007; dan
26. Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2003 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP-3).

1.3. Tujuan, Sasaran dan Fungsi RKPD

1.3.1. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Sasaran

Sasaran RKPD adalah menjadi acuan dan pedoman pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber lainnya yang sah.

1.3.3. Fungsi

RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2009 berfungsi sebagai pedoman bagi :

- a. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-SKPD);

- b. pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan RAPBD Kota Tasikmalaya.

1.4. Prinsip dan Proses Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan yang merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat, pendekatan yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor dan lintas pelaku, pendekatan perpaduan antara *bottom-up* (aspirasi dari bawah) dengan *top-down* (kebijakan dari atas) yang diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP-3) mulai dari tingkat RT/RW, tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, hingga ke tingkat Kota Tasikmalaya secara partisipatif yang melibatkan seluruh *stakeholders*.

Proses penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode tahun 2007;
2. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan yang disampaikan oleh Kepala SKPD;
3. Bappeda melaksanakan penyusunan Rancangan RKPD dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
4. Pembahasan Rancangan RKPD yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) berdasarkan Renstra SKPD, tugas dan fungsi SKPD serta capaian keberhasilan dan permasalahan pada periode sebelumnya;
5. Pelaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP-3) tingkat Kelurahan dan Kecamatan dengan masukan bahan Rancangan RKPD dan Renja SKPD;
6. Bappeda melaksanakan Forum Gabungan SKPD untuk mensinergikan prioritas program dan kegiatan hasil MP-3 Tingkat Kecamatan dengan Renja SKPD;
7. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang / MP-3 Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan program masukan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD;

8. Walikota (up. Kepala Bapeda) sebagai peserta mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan / Musrenbang Tingkat Propinsi Jawa Barat dan Tingkat Nasional;
9. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD dan naskah Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Tasikmalaya;
10. Penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2009;
11. Penyampaian Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2009 kepada SKPD sebagai acuan untuk penyempurnaan Renja SKPD serta menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.5. Visi dan Misi Jangka Menengah Kota Tasikmalaya

Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Kota Tasikmalaya, sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dirumuskan dari Visi Kepala Daerah hasil pemilihan langsung. Perumusan visi pembangunan ini juga mempertimbangkan kondisi umum Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan pada periode – periode sebelumnya. Kondisi keberhasilan masa depan Kota Tasikmalaya hingga tahun 2012 dinyatakan dalam visi:

“Kesejahteraan Masyarakat, dalam Bingkai Iman dan Taqwa”

Sebagai jalan untuk mencapai visi diatas, maka dirumuskan misi pembangunan selama periode lima tahun kedepan, yaitu:

- 1. Mewujudkan Kesederajatan Hukum**, yaitu bahwa seluruh komponen pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang terdiri dari pemerintah, rakyat dan swasta memperoleh perlakuan dan kedudukan yang sama dalam hukum. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan:
 - Hukum adalah pengendali sosial;
 - Tegak tidaknya hukum sangat bergantung kepada penegak hukum;
 - Hukum bukan alat bagi penguasa untuk berbuat sewenang - wenang;
 - Masyarakat diberi hak untuk mengawasi pemerintahan daerah;
 - Pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
- 2. Mewujudkan Kesederajatan Ekonomi**, yaitu bahwa peningkatan ekonomi masyarakat bukan diorientasikan untuk golongan tertentu, tetapi juga merupakan hak dari seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat yang merata tersebut tentunya dengan mempertimbangkan:
 - Bahwa masyarakat berhak atas penghidupan yang layak;

- Bahwa masyarakat berhak memperoleh jaminan berusaha yang aman, sehat dan kompetitif;
- Bahwa masyarakat berhak memperoleh fasilitas hak-hak ekonomi yang adil dan tidak diskriminatif;
- Bahwa pemerintah menyediakan prasarana, sarana dan fasilitasi dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

3. Mewujudkan Kesederajatan Sosial Budaya, yaitu pemerataan dampak – dampak positif dari pembangunan terhadap masyarakat sebagai hasil akhir dari kesederajatan hukum dan kesederajatan ekonomi. Pemerataan sosial budaya tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

- Bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh jaminan perlindungan sosial yang tidak diskriminatif;
- Bahwa masyarakat berhak memperoleh jaminan pendidikan yang layak, kompetitif serta tidak diskriminatif;
- Bahwa masyarakat berhak memperoleh jaminan kesehatan yang baik;
- Bahwa masyarakat berhak melestarikan dan mengembangkan budaya dengan tidak melanggar norma-norma yang ada.

Visi dan Misi Kota Tasikmalaya dapat dicapai secara efektif apabila tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD dirumuskan secara tepat dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah bersama-sama dengan seluruh unsur pelaku pembangunan (*stakeholders*) Kota Tasikmalaya.

1.6. Sistematika

RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2009, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran dan fungsi, prinsip dan proses penyusunan, Visi dan Misi Kota Tasikmalaya, serta sistematika penyusunan RKPD.

BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Menjelaskan tentang evaluasi pembangunan, kondisi dan perkiraan ekonomi, serta arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

BAB III PRIORITY PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA

Menjelaskan prioritas pembangunan berdasarkan isu strategis, dan prioritas program pembangunan.

BAB IV RENCANA KERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Menjelaskan tentang rumusan prioritas pembangunan berdasarkan program, indikasi kegiatan, sasaran, lokasi, sumber dana dan SKPD pelaksana.

BAB V KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN

Menjelaskan tentang prakiraan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2009 dari berbagai sumber dana dan peran pemerintah yang diperlukan dalam hal pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dituangkan dalam kebijakan umum APBD serta prakiraan pagu anggaran indikatif program pembangunan.

BAB VI PENUTUP

BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun 2007 merupakan gambaran keberhasilan implementasi dari kebijakan tahun 2007, dimana hasil pelaksanaannya sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya tahun 2007 dalam realisasinya mencapai 72,93. Hal ini menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 72,05. Namun bila melihat rencana pencapaian IPM pada Renstra Kota Tasikmalaya, ternyata masih belum memenuhi harapan. Penyebabnya adalah lambatnya perkembangan indeks-indeks pembentuk angka IPM tersebut terutama indeks daya beli. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan, kesehatan dan daya beli bukan persoalan mudah untuk diatasi tapi merupakan persoalan cukup rumit, saling terkait dan kompleksitasnya sangat tinggi.

Indeks Pendidikan, merupakan komposit dari indeks Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Jika melihat komponen IPM, kontribusi terbesar diperoleh dari indeks pendidikan yang mencapai 85,22 pada tahun 2006 menjadi 85,99 di tahun 2007 atau naik sebesar 0,77 poin. Indeks pendidikan sebesar itu lebih banyak disumbang oleh indeks AMH dibanding indeks RLS.

Indeks Kesehatan mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Kota Tasikmalaya tahun 2006 sebesar 67,58 tahun, meningkat menjadi 68,44 tahun pada tahun 2007. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat Kota Tasikmalaya masih belum begitu menggembirakan. Dalam bentuk indeks, AHH di Kota Tasikmalaya pada tahun 2006 sebesar 70,97 sementara pada tahun 2007 sebesar 72,40.

Indeks daya beli sebagai komponen IPM, memiliki kompleksitas yang sangat rumit, menyangkut faktor ekonomi, sosial, politik dan lain-lain bahkan kondisi alam semisal musim. Kebijakan di sektor ekonomi tidak cukup untuk mendongkrak peningkatan daya beli masyarakat tanpa diimbangi oleh kebijakan di sektor lain. Paritas daya beli di Kota Tasikmalaya pada tahun 2006 sebesar 559,48 meningkat menjadi 561,39 pada tahun 2007 atau bila menggunakan

indeks terjadi kenaikan sebesar 0,45 poin dan menduduki posisi terakhir dalam kontribusi pencapaian angka IPM.

Jumlah Penduduk secara *de jure* (hukum) dan *de facto* (fakta) di Kota Tasikmalaya pada tahun 2007 mencapai 630.191 jiwa. Sementara dibandingkan tahun 2006 yang 617.767 mencapai jiwa, berarti ada penambahan sebanyak 12.424 jiwa atau laju pertumbuhan penduduknya mencapai 2,01 persen. Dengan luas 171,56 kilo meter persegi, berarti kepadatan penduduknya mencapai 3.673 jiwa per kilo meter persegi.

Penduduk menuntut banyak hal, mulai masalah kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, arus transportasi, dll. Sehingga masalah kependudukan menuntut pemerhatian yang seksama dan penanganan yang baik, karena penduduk merupakan potensi sekaligus beban bagi pembangunan.

Jumlah Penduduk Miskin dengan menggunakan konsep garis kemiskinan, pada tahun 2003 sebanyak 9,32 persen dari jumlah penduduk keseluruhan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2004 menjadi 8,48 persen. Pada tahun 2005 terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 11,61 persen. Hal itu terjadi akibat pemerintah pusat pada bulan Maret dan Oktober 2005 menaikkan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada naiknya harga-harga secara umum di berbagai komoditi dan sektor. Pada tahun 2006 persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi sebesar 9,03. Angka persentase diatas bila dikalikan jumlah penduduk akan terlihat sangat besar karena menyangkut jiwa manusia sehingga memerlukan penanganan yang baik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Berlaku dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, artinya dari sisi nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh perekonomian di Kota Tasikmalaya secara bertahap mengalami perkembangan. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2002 sebesar 3,186 trilyun meningkat terus hingga pada tahun 2006 mencapai 5,264 trilyun. Namun perlu dimaklumi penghitungan PDRB diatas menggunakan harga pada tahun yang bersangkutan sehingga untuk melihat pertumbuhannya memerlukan ukuran lain yaitu PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, pada tahun 2006 PDRB sebesar Rp. 3,097 trilyun.

Inflasi merupakan indikator stabilitas perekonomian, sangat diperhatikan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari indikator untuk mengendalikan sektor moneter. Inflasi dipahami sebagai proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu), dengan kata lain proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Inflasi di tingkat konsumen di Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun berfluktuasi namun yang melampaui dua digit terjadi di tahun 2002 sebesar 10,29 persen dan 20,83 persen di tahun 2005. Inflasi diatas dua digit mencerminkan terjadinya proses penurunan nilai mata uang yang relatif besar dan berdampak pada terganggunya aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi sehingga dipandang kurang baik dalam perekonomian. Sedangkan inflasi di tahun 2003 sebesar 3,88 persen; tahun 2004 sebesar 5,92 persen dan 8,44 persen di tahun 2006.

Laju Pertumbuhan Ekonomi diukur menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, artinya dalam proses penghitungannya menggunakan harga pada tahun dasar, sekarang menggunakan tahun 2000. Karena pengaruh faktor harga sudah dihilangkan maka dapat dipergunakan untuk membandingkan situasi perekonomian antar tahun, sehingga PDRB atas dasar harga konstan melahirkan istilah Laju Pertumbuhan Ekonomi. LPE Kota Tasikmalaya mengalami percepatan maupun perlambatan. Pada tahun 2002 sebesar 4,24 persen mengalami percepatan menjadi 4,43 persen di tahun 2003 dan 4,99 persen pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2005 mengalami perlambatan menjadi 4,02 persen, sedangkan untuk tahun 2006 mengalami percepatan menjadi 5,08 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku per kapita, artinya nilai tambah atas dasar harga berlaku yang diciptakan oleh perekonomian di Kota Tasikmalaya secara teoritis dibagi habis oleh jumlah penduduk pertengahan tahun. Dari data diatas secara bertahap mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, PDRB atas harga berlaku sebesar Rp. 9,31 juta sedangkan atas harga konstan sebesar Rp. 5,23 juta. Namun, yang perlu dicermati dari angka ini menyangkut aliran nilai tambah yang belum tentu dinikmati penduduk Kota Tasikmalaya, sebab pelaku ekonominya bukan hanya penduduk Kota Tasikmalaya. Selain itu pemerataan, karena sangat mungkin terjadi, nilai tambah yang diciptakan dalam aktivitas perekonomian di Kota Tasikmalaya mengelompok di satu atau lebih golongan saja.

2.1.1. Pencapaian Kinerja

Untuk tahun 2007, Evaluasi kinerja berdasarkan Renstra Kota Taikmalaya 2002-2007. Dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau program dilaksanakan melalui pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dari program yang telah ditetapkan.

Dalam evaluasi kinerja, dilakukan penghitungan nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian

kinerja pelaksanaan program, kebijakan, sasaran, tujuan hingga misi dan visi yang didasarkan pada nilai capaian kinerja kegiatan.

Berdasarkan pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja yang telah dilakukan, Nilai Capaian Kinerja (NCK) Misi Kota Tasikmalaya berada di atas 80,00. Jika dilakukan kategorisasi Nilai Capaian Kinerja dengan menggunakan 5 kategori penilaian, dimana Nilai Capaian Kinerja :

1. $0 < NCK \leq 20$: buruk
2. $20 < NCK \leq 40$: kurang
3. $40 < NCK \leq 60$: cukup
4. $60 < NCK \leq 80$: baik
5. $80 < NCK \leq 100$: sangat baik

Maka Nilai Capaian Kinerja Misi berada pada kategori “sangat baik”. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut :

Tabel 1. Evaluasi Kinerja Visi Kota Tasikmalaya Tahun 2007

No	Misi	Nilai Capaian Misi (%)	Kategori
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa	96.32	Sangat Baik
2.	Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum	94.39	Sangat Baik
3.	Menumbuhkan kekuatan ekonomi Kota	99.32	Sangat Baik
4.	Menciptakan pemerintahan yang profesional dan bersih	94.83	Sangat Baik
5.	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota	94.21	Sangat Baik
6.	Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	95.87	Sangat Baik
7.	Mengoptimalkan dan membangun sarana dan prasarana kota	99.54	Sangat Baik

Sumber: Bahan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2007

Selanjutnya berdasarkan Nilai Capaian Kinerja Misi tersebut, dengan memperhatikan bobot atau pengaruh masing-masing misi terhadap pencapaian visi, diperoleh Capaian Kinerja Visi pada tahun 2007 sebesar 96,42. Nilai Capaian Kinerja Visi ini termasuk ke dalam kategori “sangat baik”. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. di bawah ini :

Tabel 2. Evaluasi Kinerja Visi Kota Tasikmalaya Tahun 2007

No	Misi	Nilai Capaian Misi (%)	Bobot Misi	Nilai Capaian Akhir
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa	96,32	14	13,48
2.	Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum	94,39	14	13,21
3.	Menumbuhkan kekuatan ekonomi Kota	99,32	15	14,90
4.	Menciptakan pemerintahan yang profesional dan bersih	94,83	14	13,28
5.	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota	94,21	14	13,19
6.	Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan	95,87	14	13,42
7.	Mengoptimalkan dan membangun sarana dan prasarana kota	99,54	15	14,93
JUMLAH NILAI CAPAIAN VISI			100	96,42

Sumber: Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2007
Keterangan :

Visi Kota Tasikmalaya berlaku untuk 10 tahun yakni sampai tahun 2012, sehingga Nilai Capaian Akhir (NCA) Visi untuk setiap tahunnya ("n") diperoleh dengan rumus $n = \text{NCA} : 10$, sehingga pencapaian Visi untuk tahun 2007 adalah :

$$96,42 : 10 = 9,64$$

2.2. Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Daerah

2.2.1. Perkembangan ekonomi Daerah

Kemajuan ekonomi secara makro seringkali dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonominya.

Pada tahun 2001, PDRB Kota Tasikmalaya mencapai sebesar 2,841 triliun rupiah meningkat menjadi sebesar 3,186 triliun rupiah di tahun 2002 dan pada 4 tahun berikutnya naik secara signifikan menjadi 5,512 triliun rupiah di tahun 2006. Adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa produktivitas dari aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya secara perlahan mengalami peningkatan atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Tahun 2001-2006

TAHUN	PDRB (juta rupiah)	
	Adh berlaku	Adh konstan 2000
2001	2.841.509,20	2.479.073,31
2002	3.186.100,76	2.584.132,14
2003	3.439.511,05	2.698.635,23
2004	3.785.358,27	2.833.366,58
2005	4.617.521,91	2.947.228,42
2006	5.512.622,45	3.097.968,38

Sumber : indikator makro kota tasikmalaya tahun 2007

Dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor tersier memegang peranan yang paling besar, dengan kontribusi di atas 60 persen. Disusul oleh sektor sekunder dan terakhir sektor primer. Sejak tahun 2001 secara perlahan kontribusi sektor primer terhadap pembentukan PDRB mengalami penurunan. Sektor primer dari 11,11 persen pada tahun 2001 menjadi 10,52 persen pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 menjadi 9,65 persen; 9,30 persen pada tahun 2004, 8,55 pada tahun 2005 serta 7,91 pada tahun 2006. Sebaliknya untuk sektor tersier justru secara perlahan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2001 dari 62,49 persen naik menjadi 63,41 persen pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2003 menjadi 63,43 persen, 63,60 persen pada tahun 2004 serta 66,03 persen pada tahun 2006. Sedangkan untuk sektor sekunder, sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 cenderung turun yaitu dari 26,39 persen menjadi 26,07 persen. Akan tetapi pada tahun 2003 dan 2004 mengalami sedikit kenaikan yaitu menjadi 26,92 persen dan 27,10 persen dan tahun 2005 dan 2006 kembali turu

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya tahun 2001 sebesar 3,75 persen. Pada tahun 2002 LPE Kota Tasikmalaya tetap tumbuh sebesar 4,24 persen. Untuk tahun 2003, LPE Kota Tasikmalaya adalah 4,43 persen. Pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2005 Laju Pertumbuhan Ekonomi tidak tumbuh sepesat tahun 2004, walaupun secara umum Ekonomi pada tahun 2005 masih mengalami pertumbuhan sebesar 4,02 persen. Hal ini disebabkan banyak faktor salah satunya adalah kebijakan moneter yang dilakukan BI dengan tidak menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi bertujuan untuk menekan laju inflasi yang melonjak dikarenakan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM). Naiknya biaya produksi yang disebabkan tingginya harga BBM dan tingginya suku bunga menyebabkan sektor real sulit untuk meningkatkan produksinya.

Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi kembali membaik mencapai 5,11%. Untuk sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan yang cukup bagus pada tahun 2006 yaitu sebesar 5,54 persen, namun dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif.

Secara umum, sektor yang memiliki kontribusi dominan di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu lima tahun adalah sektor perdagangan, hotel dan restaurant yaitu berturut-turut 30,68 % ; 30,75 % ; 30,01 % ; kemudian menurun menjadi 29,97 % pada tahun 2006. Sektor lain yang cukup besar pertumbuhannya adalah sektor industri pengolahan yang selama kurun waktu lima tahun selalu mengalami pertumbuhan di atas 5 %, yang berkisar antara 5,77 % pada tahun 2001 dan mencapai nilai tertinggi sebesar 8,54 % pada tahun 2002. Kontribusi sektor industri pengolahan ini pada selama lima tahun pada PDRB Kota Taikmalaya berada pada kisaran nilai 15 %. Nampaknya sektor ini akan memiliki peran yang penting dalam menggerakkan aktivitas perekonomian mengingat laju pertumbuhannya cukup tinggi serta kontribusinya pada PDRB Kota Tasikmalaya cukup besar.

Untuk jangka lima tahun ke depan peran sektor pertanian nampaknya akan semakin menurun. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kota Tasikmalaya selama tahun 2001- 2006 yang cenderung menurun, yaitu mencapai 10,94 % pada tahun 2001, kemudian berturut-turut dari tahun 2002 sampai 2005 adalah : 10,77 %; 10,41 %; 10,01 % dan semakin menurun menjadi 7,91 % pada tahun 2006. Selain itu laju pertumbuhannya pada rentang tahun 2003 sampai 2005 di bawah 1 %, sehingga nampaknya tidak bisa diharapkan akan menjadi sektor dominan yang berkontribusi besar pada PDRB Kota Tasikmalaya. Hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa 68,33 % dari luas lahan di Kota Tasikmalaya masih didominasi untuk kegiatan pertanian, termasuk perikanan dan peternakan.

2.2.2. Tantangan

Perekonomian Kota Tasikmalaya baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kota Tasikmalaya untuk tahun mendatang diperkirakan adalah pertama, ketergantungan pangan terhadap produk impor. Hal ini akan mengakibatkan hambatan terhadap ketersediaan produk pangan. Untuk itu perlu dilakukan penyediaan distribusi dan kualitas pangan yang memadai. Kedua, terjadinya krisis energi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi terhadap meningkatnya tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi perekonomian kota tasikmalaya diperkirakan adalah: pertama, ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik, akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik investor. Kedua, peningkatan investasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh regulasi daerah dalam perijinan, untuk itu program pelayanan satu pintu diharapkan dapat meningkatkan investasi di kota Tasikmalaya.

Perekonomian Kota Tasikmalaya pada tahun 2009 dihadapkan pada tantangan yang semakin berat. Namun apabila melihat indikator makro, optimisme terhadap ekonomi kota Tasikmalaya muncul seiring dengan kondisi makro ekonomi yang semakin membaik dari tahun ke tahun.

2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi makro ke depan diarahkan untuk Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan berdimensi pemerataan dengan sasaran :

1. Terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;
2. Terwujudnya pengelolaan yang optimal dan profesional dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai aset potensi ekonomi rakyat;
3. Terwujudnya optimalisasi kredit lunak untuk usaha kecil dan menengah guna menunjang keberlangsungan dan kemajuan ekonomi rakyat;
4. Terwujudnya pemberian jaminan hukum yang layak dan proporsional terhadap para pengusaha sektor informal;
5. Terwujudnya optimalisasi sentra industri kecil dan menengah sebagai aset wisata *home industri*;
6. Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (*community-based resources management / CBRM*).

Pada tahun 2009 pembangunan di Kota Tasikmalaya dititikberatkan pada pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah seperti jaringan jalan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Jaringan jalan yang berkualitas kota menggambarkan kondisi jalan yang memenuhi standar konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsinya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Tema Pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2009:

“Kota Tasikmalaya dengan Infrastruktur yang Berkualitas Kota”

2.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.4.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni melampaui kisaran 60%. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula dengan sumber – sumber pendapatan

lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain – lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan – kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

a. Perbaikan Manajemen

Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan:

- Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
- Menyederhanakan prosedur perijinan;
- Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kota, maupun antar sektor;
- Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
- Menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
- Meniadakan tumpang tindih pemungutan;
- Menyederhanakan prosedurnya.

c. Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset dan peningkatan *turn over*. Optimalisasi aset juga dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan swasta. Selain itu juga diperlukan perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik –baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada

pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program – program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

2.4.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

c. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan – kegiatan di bidang infrastruktur, daya beli, kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kota Tasikmalaya.

d. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

e. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta bila memungkinkan.

f. **Transparan dan akuntabel**

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui publikasi masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasilnya.

2.4.3. Arah Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pada dasarnya disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan Tahun Anggaran 2009 untuk penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA, Penerimaan Piutang Daerah dan pencairan DCD sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal / investasi daerah, pemberian pinjaman dan keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009

2.1 ISU STRATEGIS

Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Tasikmalaya, diperlukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting apabila dikaitkan dengan pencapaian target indikator makro pembangunan yang masih belum mencapai target. Untuk itu pencapaian target pembangunan masih perlu dilakukan optimalisasi dalam implementasinya. Berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat Kota Tasikmalaya pada Tahun 2009 diharapkan lebih fokus pada program maupun kegiatan yang mempunyai daya dukung pencapaian target dimaksud.

Perkembangan indikator makro Kota Tasikmalaya sebagai representasi keberhasilan pembangunan di Kota Tasikmalaya menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian Indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tiga komponen saja yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli, akan tetapi sesungguhnya dipengaruhi pula oleh semua bidang pembangunan, baik yang terkait secara langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun yang dianggap sebagai penunjang. Di samping itu, keberhasilan pencapaian Indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program maupun kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Kota, akan tetapi dipengaruhi oleh semua program maupun kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh berbagai tingkatan Pemerintahan, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Sumbangan Pihak swasta atau swadaya masyarakat.

Oleh karena itu, perkembangan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara umum selama kurun waktu Tahun 2007, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2009. Disamping itu hal lain yang dijadikan sebagai dasar rujukan penentuan isu strategis adalah masalah terkini yang terjadi dalam skala nasional dan provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya 2008-2012.

Isu-isu strategis yang mendasari rencana kerja pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2009 adalah :

1. Pelayanan Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah. Infrastruktur wilayah yang terdiri dari infrastruktur transportasi, sumberdaya air, jaringan listrik, serta sarana dan prasarana permukiman berperan sebagai pengarah pembentukan struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

Panjang jalan di Kota Tasikmalaya adalah 686.816 Km, terdiri atas 1,39 persen (9.520 km) Jalan Negara; 4,64 persen (31.890 km) Jalan Propinsi dan 93,97 persen (645.406) Jalan Kota. Dari seluruh jalan yang ada di Kota Tasikmalaya 36,00 persen (232.346 km) dalam kondisi baik; 15,00 persen (96.811 km) dalam kondisi sedang; 34,00 persen (219.438 km) dalam kondisi rusak dan sisanya 15,00 persen (96.811 km) dalam kondisi rusak berat.

Dilihat dari jenis konstruksinya, jalan di Kota Tasikmalaya yang sudah di aspal adalah 70,36 persen (454.114 km) dari seluruh jalan, Jalan Kerikil 17,51 persen (113.017 km) dan Jalan Tanah 12,13 persen (78.275 km). Kondisi tersebut menuntut upaya perbaikan yang tidak sedikit memerlukan biaya. Maka diperlukan strategi yang cermat dalam mengupayakan teknologi pembangunan dan pemeliharaan jalan yang awet serta mengupayakan pendanaannya.

Sebagian besar kebutuhan Listrik di Kota Tasikmalaya dilayani oleh PT. PLN. Kebutuhan energi listrik pada Tahun 2006 semakin meningkat baik untuk konsumsi rumahtangga maupun untuk dunia usaha yang mencapai 210.972.885 Kwh tenaga listrik yang terjual dengan jumlah pelanggan sebanyak 136.636 pelanggan.

Kebutuhan air bersih semakin dirasakan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya, ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah konsumen air minum pada Tahun 2006, yaitu sebanyak 30.628 konsumen dengan jumlah air minum yang terjual sebanyak 6.362.908 meter kubik.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan

Pelayanan kesehatan berkaitan dengan ketersediaan sarana kesehatan baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, ketersediaan sumberdaya manusia kesehatan, peralatan dan obat-obatan.

Pembangunan bidang kesehatan dilihat dari cakupan layanan kesehatan menunjukkan kondisi yang belum optimal, hal ini dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit yang masih berjangkit di masyarakat. angka harapan hidup meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun masih harus lebih ditingkatkan untuk dapat mencapai angka harapan hidup standar nasional yaitu 68,23 Tahun maupun UNDP yaitu 85 tahun. Selain itu angka kematian bayi, kematian Batita dan kematian ibu melahirkan masih relatif tinggi sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius.

Ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan, diantaranya pelayanan kesehatan dasar terutama untuk penduduk miskin masih harus ditingkatkan dari segi akses maupun kualitasnya, masih perlunya penanganan khusus untuk kasus-kasus seperti DBD, diare, suspect flu burung dan kasus gizi buruk. Di samping itu juga dibutuhkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), selain penanganan secara menyeluruh terhadap kesehatan lingkungan, air bersih dan sanitasi perumahan.

3. Pemerataan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pengelolaan Pendidikan

Pembangunan pendidikan sangat penting dikarenakan perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan; sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

Upaya mewujudkan pembangunan sektor Pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan, mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan dan pencitraan publik, telah dilakukan meskipun belum semuanya optimal. Upaya pemerataan pendidikan di Kota Tasikmalaya telah dilakukan melalui kegiatan Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan 12 Tahun, Juga dengan diwujudkannya MoU *Role Sharing* Pendanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, serta masih dilanjutkannya pemberian beasiswa bagi siswa SMP/MTs/PKBM yang berasal dari keluarga tidak mampu, upaya tersebut diharapkan telah optimal memenuhi sasaran yang diharapkan.

Adapun dalam upaya peningkatan aspek mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan dan pencitraan publik, masih belum optimal dilaksanakan. Bila melihat kebijakan Pemerintah Pusat tentang ditingkatkannya standar kelulusan berdasarkan Ujian Nasional (UN), aspek kualitas pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Di samping itu, kualitas lulusan pendidikan terutama pendidikan menengah saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti sempitnya lapangan pekerjaan dan semakin kompetitifnya seleksi masuk Perguruan Tinggi. Empat hal yang menyangkut mutu dan relevansi pendidikan, yaitu profesionalisme dan kesejahteraan guru, kurikulum berbasis kompetensi, globalisasi dan teknologi informasi untuk pendidikan, serta kerjasama dengan dunia usaha dan industri, serta muatan lokal yang berbasis potensi unggulan daerah. Begitupun dengan aspek tata kelola yang meliputi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), standarisasi pelayanan pendidikan, partisipasi masyarakat, dan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

pendidikan. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah dan kualitas SDM tenaga pendidik, serta kurangnya upaya pemutakhiran data dan informasi pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang komprehensif tentang peningkatan aspek-aspek tersebut.

4. Pengelolaan Potensi Ekonomi Masyarakat

Sesuai dengan sebutan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan di wilayah Priangan Timur, secara umum perekonomian Kota Tasikmalaya masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Besarnya peranan sektor ini sebesar 28,52 persen yang sumbangan terbesarnya dari perdagangan besar dan eceran sebesar 20,32 persen. Kemudian sektor industri pengolahan, peranannya sebesar 14,53 persen, merupakan sektor kedua terbesar setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kota Tasikmalaya terkenal dengan industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang menghasilkan produk seperti bordir, anyaman tikar mendong, kelom geulis, batik, dan lain-lain.

Salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari data di atas adalah aktivitas perekonomian di Kota Tasikmalaya secara perlahan mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder atau ke sektor tersier. Dengan demikian, ke depan diperlukan program-program untuk mendukung penguatan sektor sekunder dan sektor tersier, sehingga kegiatan-kegiatan kelompok sekunder yaitu industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih, serta bangunan dan kegiatan-kegiatan kelompok sektor tersier yaitu perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa dapat berkembang baik serta memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian Kota Tasikmalaya.

Meskipun ke depan peran sektor sekunder dan sektor tersier diharapkan semakin menguat, tidak berarti kelompok sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian diabaikan perannya. Sektor pertanian erat kaitannya dengan ketahanan pangan di Kota Tasikmalaya sehingga harus tetap dilaksanakan program-program untuk meningkatkan peran sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan sektor industri pengolahan, khususnya industri pengolahan hasil-hasil produk pertanian, dengan demikian perlu dilaksanakan juga kegiatan industri pengolahan hasil-hasil produk pertanian sehingga ada keterkaitan antara hulu dan hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

5. Pengentasan kemiskinan

Pada umumnya kondisi kesehatan keluarga miskin relatif lebih rendah bila dibandingkan kondisi kesehatan rumahtangga lainnya. Selain kecukupan pangan, masalah lain yang juga menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat

miskin adalah rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar. Selain itu, tingkat pendidikan akan mempengaruhi di dalam usaha-usaha mengatasi kemiskinan

menurut data hasil Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), rumahtangga yang masuk dalam kategori rumahtangga miskin di Kota Tasikmalaya mencapai 39.448 rumahtangga atau sekitar 157.792 orang (dengan asumsi rata-rata anggota rumahtangga 4 orang). Dari sebanyak 39,4 ribu rumahtangga miskin di Kota Tasikmalaya terdapat sekitar 11,90 persen-nya masuk dalam kategori sangat miskin, 33,16 persen kategori miskin dan sisanya sekitar 54,94 persen kategori hampir miskin.

Proporsi penduduk miskin di Kota Tasikmalaya masih menunjukkan angka yang tinggi. Pada tahun 2006, jumlah penduduk sebanyak 52.845 orang atau sekitar 9,03 dari jumlah penduduk kota tasikmalaya. Berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun 2005 memperlihatkan bahwa terdapat 92 % kepala rumahtangga yang dikategorikan miskin hanya berpendidikan paling tinggi tamat Sekolah Dasar. Hal-hal yang perlu diupayakan untuk menanggulangnya adalah mempertahankan program dan peningkatan pengelolaan beberapa kegiatan antara lain revitalisasi program bantuan beras untuk keluarga miskin, program jaminan kesehatan keluarga miskin, menghapuskan biaya pendidikan dasar dan menengah dan memberikan bea siswa bagi keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menengah dan tinggi, program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan informal dan ketrampilan bagi masyarakat miskin terutama melalui kegiatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Koperasi, serta program pembentukan modal melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan.

6. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Kinerja Pemerintah Daerah

Optimalisasi kinerja pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, yaitu menata kembali sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia, meningkatkan sinergitas di bidang perencanaan baik antar SKPD maupun antar tingkat pemerintahan, serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.

7. Pengelolaan Ruang dan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan aspek penataan ruang terutama dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang, kegiatan pembangunan di Kota Tasikmalaya dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah sosial, ekonomi, maupun

lingkungan. Permasalahan tersebut antara lain adalah tingginya pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor migrasi maupun pertumbuhan alami yang menuntut pemenuhan tempat tinggal dan sarana umum. Selain daripada itu, kegiatan investasi seperti industri dan jasa turut pula mempengaruhi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penggunaan lahan untuk non pertanian. Perkembangan yang terjadi menunjukkan terdapatnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Hal ini diindikasikan oleh berkurangnya kawasan terbuka hijau, peningkatan konversi lahan sawah, dan munculnya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang perlu untuk dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja penataan ruang.

Sisi lain dari dampak positif pembangunan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Fenomena yang ada menunjukkan adanya kemerosotan kualitas lingkungan di beberapa wilayah seperti alih fungsi lahan, pencemaran air dan udara serta persoalan sampah yang cenderung meningkat baik dalam skala regional maupun lokal. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan yang merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.

8. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, atau dalam pengertian lainnya merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subyek hukum maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum.

Upaya penegakan hukum tidak hanya melibatkan aparaturnya penegak hukum yang mencakup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, tetapi diharapkan dapat melibatkan semua elemen masyarakat.

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan norma-norma hukum saja, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang yang di dalamnya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, secara akademis, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia menyangkut konsep yang ada dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Persoalannya, kesadaran umum mengenai hak-hak asasi orang lain di republik ini masih belum berkembang secara sehat.

9. Penyelenggaraan Pemilu Nasional 2009

Penyelenggaraan Pemilu Nasional Tahun 2004, Pilkada Walikota Tahun 2007 dan Pilkada Gubernur Tahun 2008 sebenarnya harus sudah mendewasakan dan membiasakan masyarakat pada event-event demokrasi, namun bukan berarti tidak menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada Tahun 2009. Dalam menghadapi perubahan kepemimpinan daerah dan nasional yang perlu diantisipasi daerah adalah perilaku pengikut dalam menerima kekalahan kubunya. Karena itu segala celah ketidakpuasan harus diminimalisir agar tidak ada alasan untuk tidak menerima kekalahan. misalnya keabsahan Daftar Pemilih tetap, penegakan aturan kampanye dll. Yang perlu dibangun adalah kesadaran politik masyarakat yang didukung oleh elit partai untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan dapat menerima dan melaksanakan pemilu sebagai salah satu prosedur demokrasi dalam mengisi suprastruktur politik.

2.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009

Prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya pada dasarnya diorientasikan kepada upaya pencapaian Visi Kota Tasikmalaya pada Tahun 2012 yang akan datang serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan kepada isu-isu pembangunan yang bersifat strategis sebagaimana telah diidentifikasi pada bab sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kota Tasikmalaya 2002-2007, maka perlu ditentukan prioritas kebijakan pembangunan.

Prioritas Kebijakan Pembangunan Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana wilayah

Prioritas ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian Misi Kesederajatan Ekonomi, dimana tujuan keduanya adalah Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Prioritas ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian Misi Kesederajatan Sosial Budaya dimana tujuannya adalah Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bermoral dan Meningkatkan kesejahteraan sosial

3. Peningkatan pemerataan, mutu dan tata kelola Pendidikan

Prioritas ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian Misi Kesederajatan Sosial Budaya dimana tujuannya adalah Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bermoral dan Meningkatkan kesejahteraan sosial

4. Optimalisasi Potensi Ekonomi Masyarakat

Prioritas ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian Misi Kesederajatan Ekonomi, dimana tujuan pertamanya adalah Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

5. Pemberdayaan Penduduk miskin

Prioritas ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian Misi Kesederajatan Ekonomi, dimana tujuan pertamanya adalah Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta Misi Kesederajatan Sosial dan Budaya dimana tujuan keduanya adalah Meningkatkan kesejahteraan sosial

6. Peningkatan SDM Aparatur dan Peningkatan Kinerja pemerintah daerah

Prioritas ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian Misi Kesederajatan Hukum dimana tujuan pertamanya adalah Membangun sistem pemerintahan yang terbuka, jujur, adil dan demokratis juga mendukung misi Kesederajatan Sosial Budaya dimana tujuan pertamanya adalah Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bermoral

7. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan hidup

Prioritas ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian Misi Kesederajatan Ekonomi, dimana tujuan keduanya adalah Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah

8. Penjaminan kepastian dan penegakan hukum

Prioritas ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian Misi Kesederajatan Hukum dimana tujuannya adalah Membangun sistem pemerintahan yang terbuka, jujur, adil dan demokratis; Menegakkan supremasi hukum; dan Mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib dan damai”

9. Penyelenggaraan Pemilu Nasional 2009

Prioritas ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian Misi Kesederajatan Hukum dimana tujuannya adalah Membangun sistem pemerintahan yang terbuka, jujur, adil dan demokratis; Menegakkan supremasi hukum; dan Mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib dan damai”

Kesembilan Prioritas kebijakan pembangunan Tahun 2009 tersebut di atas harus dilaksanakan secara sinergis baik antar sektor pembangunan, antar pelaku pembangunan maupun antar wilayah. Untuk memberikan arahan lebih jelas, maka prioritas kebijakan pembangunan tahun 2009 difokuskan kepada program-program sebagai berikut :

Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana wilayah dengan fokus :

1. Peningkatan prasarana, sarana jalan dan jembatan, yang diupayakan melalui :
 - a. Program pembangunan jalan dan jembatan

- b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - c. Program pembangunan turap/talud/brojong
 - d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - e. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2. Peningkatan prasarana, sarana publik, permukiman dan tata ruang, yang diupayakan melalui :
- a. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - b. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
 - c. Program pemanfaatan ruang
 - d. Program pengendalian pemanfaatan ruang
3. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pertanian, yang diupayakan melalui :
- a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - b. Program penyediaan dan pengolahan air baku
 - c. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
 - d. Program pengembangan sistem penyuluhan pertanian

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan fokus :

1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, yang diupayakan melalui :
- a. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
 - b. puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 - c. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
 - d. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
2. Peningkatan Pelayanan kesehatan, yang diupayakan melalui :
- a. Program upaya kesehatan masyarakat
 - b. Program standarisasi pelayanan kesehatan
 - c. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
 - d. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 - e. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
 - f. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
3. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan, yang diupayakan melalui :
- a. Program perbaikan gizi masyarakat
 - b. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - c. Program pengembangan lingkungan sehat

Peningkatan pemerataan, mutu dan tata kelola Pendidikan dengan fokus :

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, yang diupayakan melalui :
 - a. Program pendidikan anak usia dini
 - b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - c. Program pendidikan menengah
 - d. Program pendidikan non formal
 - e. Program pendidikan luar biasa
 - f. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
 - g. Program manajemen pelayanan pendidikan
2. Peningkatan Kualitas tenaga pendidik, yang diupayakan melalui :
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
3. Peningkatan usaha di bidang perdagangan dan industri, yang diupayakan melalui :
 - a. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - b. Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - c. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
 - d. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
4. Peningkatan Kualitas tenaga pendidik, yang diupayakan melalui :
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Optimalisasi Potensi Ekonomi Masyarakat dengan fokus :

1. Peningkatan usaha di bidang perdagangan dan industri, yang diupayakan melalui :
 - a. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - b. Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - c. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
 - d. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, yang diupayakan melalui :
 - a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
 - b. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
 - c. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
 - d. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - e. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
 - f. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
3. Peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah, yang diupayakan melalui :
 - a. Program peningkatan kesejahteraan petani
 - b. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
- d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- e. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- f. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- h. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- i. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- j. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- k. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- l. Program rehabilitasi hutan dan lahan

Pemberdayaan Penduduk miskin dengan fokus :

1. Penanggulangan Kemiskinan, yang diupayakan melalui :
 - a. Program pemberdayaan fakir miskin, komuni dan penyandang masalah
 - b. kesejahteraan sosial (pmks) lainnya
 - c. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - d. Program pembinaan anak terlantar
 - e. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
2. Peningkatan peluang berusaha bagi penduduk miskin, yang diupayakan melalui :
 - a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - b. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3. Peningkatan administrasi perkantoran yang tertib dan akuntabel, yang diupayakan melalui :
 - a. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - c. Program peningkatan disiplin aparatur
 - d. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
 - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - f. Program peningkatan pengembangan sistem administrasi kearsipan
 - g. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - h. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Peningkatan kapasitas kelembagaan, yang diupayakan melalui :

 - a. Program peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah
 - b. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Peningkatan kualitas aparatur, yang diupayakan melalui :

 - a. Program pendidikan kedinasan

- b. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- c. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan hidup dengan fokus :

1. Pengelolaan persampahan kota, yang diupayakan melalui :
 - a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 - b. Program pengendalian banjir
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang diupayakan melalui :
 - a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3. Konservasi sumber daya alam, yang diupayakan melalui :
 - a. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
 - b. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)

Penjaminan kepastian dan penegakan hukum dengan fokus :

1. Penyusunan produk hukum daerah, yang diupayakan melalui :
 - a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2. Peningkatan perilaku taat hukum, yang diupayakan melalui :
 - a. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - b. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - c. Program pendidikan politik masyarakat

Penyelenggaraan Pemilu Nasional 2009 dengan fokus :

- Penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntable, yang diupayakan melalui :
- a. Program Pemberdayaan Infrastruktur dan Suprastruktur Politik
 - b. Program Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Berdasarkan isu strategis dan prioritas pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 disusun dalam bentuk matrik yang terdiri dari Program, Sasaran, Indikasi Kegiatan, Lokasi, Sumber Dana dan SKPD Pelaksana.

Matrik rencana kerja pembangunan Kota Tasikmalaya merupakan rencana kegiatan hasil pembahasan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan telah disinergikan dengan indikasi rencana kerja SKPD melalui Forum Gabungan SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tingkat Kota Tasikmalaya. Secara rinci Rencana Kerja Tahun 2009 dapat dilihat pada matrik berikut ini :

BAB V

KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Anggaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2009 memberikan gambaran anggaran pembangunan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai prioritas program yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP-3) tahun 2008 dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang ada.

5.1 Kerangka Anggaran Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan lebih teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

5.1.1 Kondisi APBD

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah. Belanja tersebut diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah sedangkan surplus terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

5.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen lain pendapatan daerah adalah dana perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak; dana alokasi umum (DAU); dan dana alokasi khusus (DAK).

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang terdiri atas hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; dana penyesuaian dan otonomi khusus; serta bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya. Adapun perkembangan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 4. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 - 2008

No	Jenis Pendapatan	Tahun		
		2006	2007	2008
1.	P A D	51.535.257.318,34	50.464.863.000,00	59.000.174.000,00
2.	Dana Perimbangan	417.347.868.657,00	421.563.690.000,00	487.089.789.000,00
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	3.917.835.671,00	43.653.900.000,00	37.521.433.000,00
Jumlah		472.800.961.646,34	515.682.453.000,00	583.600.000.000,00

Sumber : Perhitungan Anggaran Tahun 2006, Tahun 2007, dan tahun 2008 (murni)

Untuk rincian jenis pendapatan tidak dapat diperbandingkan karena sejak tahun 2007 ada komponen yang beralih, seperti dana bagi hasil pajak dari propinsi & pemerintah daerah lainnya, yang tadinya masuk di pos dana perimbangan, tapi sejak tahun 2007 masuk ke pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan secara total dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata pendapatan dalam tiga tahun terakhir sebesar 21,11 persen. Dengan demikian perkiraan pendapatan pada tahun 2009 adalah sekitar Rp. 657,203,891,311.

5.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah dapat dirinci menurut urusan pemerintahan daerah; organisasi; program; kegiatan; kelompok; jenis; obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Perkembangan Anggaran Belanja Kota Tasikmalaya, sebagaimana yang dialokasikan pada APBD selama 3 tahun terakhir (2006-2008) mengalami kenaikan sebagai berikut :

Tabel. 5. Perkembangan Anggaran Belanja Kota Tasikmalaya Tahun 2006– 2008

No	Tahun Anggaran	Belanja Daerah	Pertumbuhan
1.	2006	452.372.595.162,34	32,78 %
2.	2007	542.385.220.000,00	19,90 %
3.	2008	601.640.396.000,00	10,90 %
Rata-rata			21,19 %

Sumber : Perhitungan Anggaran Tahun 2006, Tahun 2007, dan tahun 2008 (murni)

5.1.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih hasil perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dll. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan; penyertaan modal/investasi daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Perkembangan Pembiayaan Kota Tasikmalaya selama 3 tahun terakhir (2006-2008) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Perkembangan Pembiayaan Kota Tasikmalaya Tahun 2006 - 2008

No	Pembiayaan	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
1.	Penerimaan Daerah	31.083.132.728,0 0	26.721.447.000,0 0	25.807.964.000,0 0
2.	Pengeluaran Daerah	2.018.709.714,00	18.710.000,00	7.778.964.000,00
Surplus / (Defisit)		29.064.423.014,00	26.702.767.000,00	18.029.000.000,0 0

Sumber : Perhitungan Anggaran Tahun 2006, 2007 dan 2008 (murni)

5.2 Proyeksi Kebutuhan Belanja Kota Tasikmalaya Tahun 2009

Berdasarkan kepada trend besaran anggaran belanja yang telah dianggarkan hingga tahun 2007, diestimasikan bahwa kebutuhan belanja langsung dari APBD kota Tasikmalaya untuk tahun 2009 sebesar Rp. 290,862,228,648,- . Dari total belanja langsung tersebut, alokasi anggaran diutamakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang masing-masing sebesar Rp. 94,768,801,127, Rp. 55,205,126,870, dan Rp. 46,661,476,283.

Sementara untuk kebutuhan belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp. 386,189,580,121. Total kebutuhan belanja daerah pada tahun 2009 sebesar Rp. 677,051,808,769.

5.3. Peningkatan Efektifitas Belanja Daerah

Secara umum bidang-bidang pembangunan dituangkan dalam 21 bidang yaitu administarsi umum pemerintahan, pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian dan UKM, penanaman modal, ketenagakerhaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, social, penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan, olahraga, kepariwisataan, dan pertanahan.

Dalam penyusunan anggaran diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran kinerja(budget performance), yaitu alokasi anggaran yang dikaitkan dengan hasil yang ingin dicapai. Anggaran kinerja diarahkan pada pemilihan program atau kegiatan yang terukur dan menyertakan kegiatan yang menjadi skala prioritas, kebutuhan atau tugas pokok dan fungsi dari lembaga pemerintah.

Alokasi anggaran disusun berdasarkan kerangka pemahaman dasar mengenai peran belanja pembangunan terhadap perkembangan indicator kinerja pembangunan. Salah satu indikator pencapaian visi dan misi pemerintah kota adalah Indeks Pembangunan manusia (IPM). Dengan demikian belanja pemerintah diarahkan untuk meningkatkan IPM. Untuk itu belanja pembangunan diarahkan terutama untuk bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli. Selanjutnya belanja pembangunan untuk bidang infrastruktur juga diperhitungkan sebagai unsure yang ikut mendukung peningkatan indeks-indeks komposit IPM.

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya tahun 2009 adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Tasikmalaya 2008-2012, merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rencana kerja dan kerangka anggaran pembangunan.

RKPD Kota Tasikmalaya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif (MP-3) mulai dari tingkat pemerintahan kelurahan, tingkat kecamatan yang disinergikan dengan rencana kerja SKPD dalam Forum Gabungan SKPD maupun dalam MP-3 tingkat Kota Tasikmalaya untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan serta penyesuaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2009.

RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2009 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai langkah awal proses penyusunan RAPBD Kota Tasikmalaya tahun 2009.

Dengan adanya RKPD Kota Tasikmalaya diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran visi kota tasik, dapat lebih terkoordinasikan, terintegrasi, dan sinergis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT